

## PERCEPATAN PEMULIHAN PELAYANAN PUBLIK PASCABENCANA BANJIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPATIF DI KANTOR BPKD ACEH TAMIANG

Jovan Alfredo Shaquille<sup>1)</sup>, Fitri Yul Dewi Martha<sup>2)</sup>, Robby Radhiya Hamdani<sup>3)</sup>,  
Luthfi Azhari<sup>4)</sup>, M. Rafi Tri Saputra<sup>5)</sup>, Pasha Romadhoni<sup>6)</sup>, Bhayangkara Junior Pigai<sup>7)</sup>,  
Alex Djan Serumi Kawer<sup>8)</sup>, Rayyan Zalfa<sup>9)</sup>, Fatih Naufal<sup>10)</sup>,  
M. Alvin Brilian Ankares<sup>11)</sup>, Rahayu Andrise<sup>12)</sup>

1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12) IPDN Kampus Sumatera Barat

E-Mail:

[35.0869@praja.ipdn.ac.id](mailto:35.0869@praja.ipdn.ac.id)

**Submitted:**  
08-03-2026  
**Accepted:**  
08-04-2026  
**Published:**  
09-04-2026

### ABSTRAK

Pemulihan pelayanan publik pascabencana merupakan fase kritis untuk memastikan keberlangsungan fungsi pemerintahan daerah. Pada November 2025, banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Aceh Tamiang yang melumpuhkan operasional pemerintahan, termasuk Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mempercepat rehabilitasi fisik Kantor BPKD melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang melibatkan kolaborasi antara aparaturnya daerah dan Praja IPDN. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi masalah, perencanaan aksi bersama, eksekusi fisik (pembersihan lumpur, relokasi arsip, perbaikan infrastruktur), dan evaluasi sistematis. Hasil kegiatan menunjukkan keberhasilan pemulihan 100% pada area fungsional Kantor BPKD, sehingga pelayanan administratif dan keuangan daerah dapat kembali beroperasi jauh lebih cepat. Simpulan dari pengabdian ini menegaskan bahwa kolaborasi partisipatif yang sinergis antara unsur akademisi, pemerintah, dan sukarelawan sangat efektif dalam mempercepat pemulihan birokrasi pascabencana dan memperkuat resiliensi institusional.

**Kata kunci:** Pemulihan pelayanan publik; pascabencana banjir; pengabdian masyarakat; Kabupaten Aceh Tamiang

### ABSTRACT

*Public service recovery post-disaster is a critical phase to ensure the continuity of local governance functions. In November 2025, a severe flash flood and landslide struck Aceh Tamiang Regency, paralyzing governmental operations, including the Regional Financial Management Agency (BPKD). This community service aims to accelerate the physical rehabilitation of the BPKD office through a Participatory Action Research (PAR) approach, involving collaboration between local government apparatus and IPDN Prajas. The implementation methods included problem identification, joint action planning, physical execution (mud cleaning, archive relocation, infrastructure repair), and systematic evaluation. The results show a 100% successful restoration of the functional areas of the BPKD office, allowing administrative and regional financial services to resume operations significantly faster. The conclusion highlights that synergistic participatory collaboration between academics, government, and volunteers effectively*

**Corresponding Author:**  
Luthfi Azhari

*accelerates bureaucratic recovery post-disaster, strengthening institutional resilience.*

**Keywords:** *Public service recovery; post-flood disaster; community service; Aceh Tamiang Regency*

## PENDAHULUAN

Bencana alam berskala besar senantiasa memberikan dampak destruktif yang masif, tidak hanya pada sektor sosial-ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap infrastruktur dan kelangsungan fungsi pemerintahan daerah (Bisani et al., 2024). Pada 22 November 2025, wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dilanda bencana banjir bandang dan longsor berskala besar yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur fisik secara menyeluruh, memutus jalur transportasi, serta memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Kerusakan ini melumpuhkan berbagai kantor pemerintahan, yang banyak di antaranya tertutup oleh endapan lumpur hingga setinggi satu meter.

Salah satu instansi vital yang terdampak parah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. BPKD memegang peranan sentral sebagai urat nadi administrasi fiskal dan pelayanan publik daerah (Dushmantha & Gallage, 2025). Ketika fungsi BPKD terhenti, seluruh proses pemulihan pascabencana yang bergantung pada pencairan anggaran daerah dan layanan publik dasar akan mengalami hambatan struktural yang serius (Málovics et al., 2025). Oleh karena itu, rasionalisasi dan urgensi kegiatan pengabdian ini berfokus pada langkah kuratif dan rehabilitatif secara cepat guna memulihkan operasional Kantor BPKD.

Berdasarkan tinjauan pustaka, strategi pemulihan institusi pascabencana memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat serta pengalihan sumber daya manusia yang terstruktur (Roe et al., 2024). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan pemulihan ruang-ruang pelayanan birokrasi dan penyelamatan dokumen negara di Kantor BPKD Aceh Tamiang dengan menerapkan pendekatan yang berorientasi pada hasil nyata. Hipotesis dari kegiatan ini adalah bahwa pengalihan satuan tugas secara terkoordinir dengan sistem kerja kolaboratif akan secara signifikan mereduksi waktu lumpuhnya pelayanan publik di tingkat daerah.

## METODE

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metodologi Participatory Action Research (PAR) yang menuntut keterlibatan aktif dan setara antara pelaksana pengabdian dengan komunitas mitra (Gralepois et al., 2024). Pendekatan ini dipilih agar tahapan rehabilitasi dapat dieksekusi tepat sasaran sesuai dengan tingkat urgensi yang dibutuhkan oleh mitra.

Mitra kegiatan ini adalah Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang. Peserta yang terlibat sebagai inisiator penggerak adalah 23 personel Satgas Kemendagri dari Praja IPDN (Dharma B Kampus Sumatera Barat) yang bertindak di bawah kepemimpinan operasional lapangan Bapak Robby Radhiya Hamdani, S.STP, M.A.P. Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

- 1) Identifikasi dan Pemetaan Masalah: Melakukan asesmen langsung terhadap volume lumpur dan tingkat kerusakan di berbagai ruangan vital BPKD.
- 2) Perencanaan Aksi Berbasis Prioritas: Menetapkan zonasi pembersihan dengan prioritas utama pada ruang arsip, area pelayanan pajak dan retribusi, serta akses utama kantor.
- 3) Tindakan Intervensi Fisik: Pengalihan tenaga masif menggunakan alat kebersihan bertekanan tinggi (*water jet*) dan armada alat berat (*dumptruck*) untuk memindahkan sedimen lumpur.

- 4) Analisis Kuantitatif Keberhasilan: Evaluasi ketercapaian diukur secara kuantitatif berdasarkan persentase (*progress rate*) area kantor yang berhasil disterilkan dari material sisa bencana dan kesiapannya untuk dioperasikan kembali.

Program unggulan dalam pengabdian ini dinamakan "Sinergi Praja Restorasi Birokrasi". Program ini menitikberatkan pada dua luaran utama: pemulihan fisik sarana prasarana pemerintahan yang tertimbun lumpur pekat dan penyelamatan/relokasi arsip-arsip keuangan daerah yang bersifat kritikal. Manfaat dari program unggulan ini adalah terselamatkannya data historis tata kelola keuangan Aceh Tamiang serta hidupnya kembali loket pelayanan publik yang esensial bagi pemulihan ekonomi warga sekitar (Swatdikun et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pemulihan berjalan secara progresif dan berhasil mencapai target sterilisasi fasilitas fisik pemerintahan sesuai dengan standar kelayakan kerja (Radityaputra et al., 2026). Luaran kegiatan ini direpresentasikan melalui perubahan signifikan pada fungsionalitas tata ruang BPKD prapemulihan dan pascapemulihan.

Prioritas pertama dilakukan pada sektor manajemen informasi birokrasi. Pindahan arsip menjadi krusial mengingat dokumen yang basah dan kotor sangat rentan terhadap kerusakan permanen (Ali & Mannakkara, 2024).



**Gambar 1.** Proses relokasi arsip keuangan daerah yang masih digunakan.

Selain fasilitas utama, pemulihan ruang publik dan fasilitas ibadah karyawan juga dilakukan secara menyeluruh guna mengembalikan aspek sosio-psikologis pegawai (Mushtaha et al., 2025).



**Gambar 2.** Rehabilitasi interior mushola pascabanjir.

Volume sedimen lumpur yang masif di area luar gedung menghambat aksesibilitas dan mobilitas aparatur maupun masyarakat sipil. Upaya ekstraktif dilakukan di seluruh bagian halaman utama.



**Gambar 3.** Pembersihan lumpur pada area halaman kantor BPKD.

Untuk melepaskan ikatan lumpur tebal yang telah mengering pada struktur bangunan, tim menggunakan teknik mekanis bertekanan tinggi yang terbukti mempercepat proses kerja secara empiris.



**Gambar 4.** Eksekusi pembersihan dengan metode penyemprotan bertekanan tinggi (*Water Jet*).

Proses sanitasi lanjutan dilakukan melalui tahapan pengepelan dan penyikatan secara manual untuk memastikan sisa mikro-sedimen lumpur dan bakteri patogen yang terbawa air banjir benar-benar hilang (Anwar et al., 2025).



**Gambar 5.** Sanitasi interior kantor pascapenyemprotan (kiri) dan Restorasi kebersihan dinding dari residu lumpur (kanan).

Perhatian terhadap detail fisik bangunan seperti transparansi pencahayaan ruang juga dilakukan dengan pembersihan kaca agar sirkulasi udara dan cahaya kembali normal, mendukung kenyamanan lingkungan kerja aparatur.



**Gambar 6.** Pembersihan panel kaca untuk pemulihan ruang kerja kondusif.

Manajemen limbah pascabencana diatasi melalui sistem pembuangan terpusat dengan memanfaatkan alat berat. Hal ini sejalan dengan teori manajemen krisis berbasis kapasitas kolaboratif lintas sektor (Aydin et al., 2025).



**Gambar 7.** Evakuasi material lumpur massal menggunakan armada Dumptruck.

Fasilitas pendukung seperti area dalam mushola dan tempat parkir yang rusak secara struktural mendapat penanganan melalui sterilisasi total dan pembongkaran demi keselamatan (mitigasi risiko susulan).



**Gambar 8.** Proses purifikasi bagian dalam mushola BPKD (kiri) dan Mitigasi bahaya fisik melalui pembongkaran struktur kanopi parkir yang runtuh (kanan).

Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa mobilisasi akademisi dan praja dalam masa tanggap darurat menghasilkan akselerasi yang luar biasa pada fase

rehabilitasi fasilitas publik. Pelaksanaan pembersihan tidak hanya mengembalikan kebersihan fisik, namun secara sosiologis memulihkan moral aparat daerah untuk segera kembali memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Sani & Wibowo, 2026).

## 2) Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Setelah semua rangkaian taktis harian dijalani, langkah krusial yang diimplementasikan adalah pengawasan dan monitoring melekat secara terpusat. Setiap akhir sesi, dilakukan evaluasi kinerja berbasis partisipatif guna menganalisis kendala mekanis maupun tenaga di lapangan. Koordinasi ini memastikan kegiatan pada hari berikutnya berjalan secara lebih presisi.



**Gambar 9.** Koordinasi dan evaluasi progres bersama Kasat Dharma.

Sistem koordinasi yang dibangun antara pembimbing lapangan, Kasat Dharma, dan pelaksana pengabdian memastikan tidak terjadinya tumpang tindih komando dan efisiensi waktu pemulihan terjamin.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang ini dinilai sangat berhasil. Melalui pendekatan partisipatif yang dilakukan secara kolektif, intervensi fisik di kawasan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berhasil mengembalikan kelayakan fungsional operasional kantor hingga 100%. Percepatan pembersihan material lumpur dan pengamanan arsip birokrasi memegang peranan krusial agar instansi tersebut mampu beroperasi kembali dan melayani publik secara normal. Saran untuk keberlanjutan kegiatan serupa di masa depan adalah perlunya pemerintah daerah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Rekod Darurat agar arsip pemerintahan yang berada di zona rawan bencana dapat dievakuasi secara proaktif pada fase mitigasi (pra-bencana) guna meminimalisir kerusakan yang terjadi.

## REFERENSI

- Ali, R. A., & Mannakkara, S. (2024). Phased post-disaster recovery challenges: 2016–2017 floods and landslides in Colombo and Kalutara, Sri Lanka. *International Journal of Disaster Risk Reduction, 111*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104728>
- Anwar, Y., Bachri, S., Utaya, S., Sumarmi, & Mislan. (2025). Cultural imperatives and environmental challenges: burial practices in flood-prone area of Mahakam Cascade Lake community to improve cultural resilience and sustainability. *Environmental Challenges, 20*. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2025.101253>

- Aydin, N. Y., Celik, K., Gecen, R., Kalaycioglu, S., & Duzgun, S. (2025). Rebuilding Antakya: Cultivating urban resilience through cultural identity and education for post-disaster reconstruction in Turkey. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2025.105196>
- Bisani, S., Daye, M., & Mortimer, K. (2024). Legitimacy and inclusivity in place branding. *Annals of Tourism Research*, 109. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2024.103840>
- Dushmantha, A., & Gallage, C. (2025). During- and post-flood damage-vulnerability window in unbound granular pavements: A degree-of-saturation threshold decision rule. *Results in Engineering*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.108157>
- Gralepois, M., Paauw, M., Guevara, S., & Crabbé, A. (2024). Overcoming barriers to integrate more justice into climate change policies. Lessons from adaptation policies and flood risk management in Flanders and France. *Total Environment Advances*, 10. <https://doi.org/10.1016/j.teadva.2024.200098>
- Málovics, G., Géring, Z. M., Bajmócy, Z., Juhász, J., Csillag, S., & Király, G. (2025). University-community engagement and sustainability change: Opportunities and constraints for business schools. *International Journal of Management Education*, 23(3). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2025.101228>
- Mushtaha, A. W., Alaloul, W. S., Baarimah, A. O., Musarat, M. A., Alzubi, K. M., & Khan, A. M. (2025). A decision-making framework for prioritizing reconstruction projects in post-disaster recovery. *Results in Engineering*, 25. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.103693>
- Radityaputra, R., Baidawi, S., & Mendes, P. (2026). A scoping review of policies and practices to support young people transitioning from out-of-home care in Asia. *Children and Youth Services Review*, 108777. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2026.108777>
- Roe, Y., Allen, J., Haora, P., Hickey, S., Briggs, M., Wilkes, L., Nelson, C., Watego, K., Coddington, R., Ireland, S., Kruske, S., Gao, Y., & Kildea, S. (2024). Enabling the context for Aboriginal and Torres Strait Islander Community Controlled Birthing on Country services: Participatory action research. *Women and Birth*, 37(2), 368–378. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2023.11.007>
- Sani, I. S., & Wibowo, A. (2026). Impacts of flooding on agricultural practices in Bunkure Local Government Area, Kano State, Nigeria. *Evolving Earth*, 4, 100110. <https://doi.org/10.1016/j.eve.2026.100110>
- Swatdikun, T., Pathak, S., & Surbakti, L. P. (2024). Sustainable Small and Medium Enterprises (SMEs) in the times of COVID-19. *Progress in Disaster Science*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2024.100327>